

DAFTAR PUSTAKA

- Andy P. Hamzah, Arief Surya Irawan, dkk. 2014. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- BPK RI. 2015. Pendapat BPK: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI Tahun 2015.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 2 Tahun 2005*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- KSAP. Modul 1 – Konsep dan Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah. Jakarta.
- KSAP. Modul 2 – Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta.
- KSAP. Modul 3 – Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta.
- KSAP. 2013. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2011. “Telaah Kritis Terhadap Kerangka Konseptual PP 71/2010” dalam majalah *Media Keuangan Daerah Edisi II Vol.1 2011*. Dirjen Keuangan Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Satu. Yogyakarta: LKMPD
- Wibowo, Ridha Mashudi. 2011. *Cermat Menulis dalam Bahasa Indonesia*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: A.Com Press.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- , Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- , Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja.
- , Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- , Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.